Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia

Muh. Sadli Sabir¹, Muh. Hamka Mauladi²

¹Institut Parahikma Indonesia, Gowa

²Institut Parahikma Indonesia, Gowa

E-mail: sadlisabir@parahikma.ac.id,

Abstrak

Executive review dan Judicial review saling memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing pada pengujian/pembatalan peraturan daerah di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah kini telah dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki peran eksklusif sebagai lembaga yang berwenang untuk membatalkan peraturan daerah. Namun, situasi ini justru menimbulkan beban yang signifikan ketika Mahkamah Agung masih menghadapi kelemahan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan tersebut. Executive review justru diharapkan hadir kembali untuk bekerja sama dengan Judicial review untuk mempercepat pembangunan hukum di daerah. Indikator perbandingan penelitian ini adalah yuridis/kesesuaian dengan hukum, upaya banding, status lembaga negara, kebutuhan masyarakat, waktu proses pengujian/pembatalan dan kemandirian lembaga negara. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi. Kemudian data dikelola dengan cara deskriptif dan disajikan pula dalam bentuk tabel.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Executive Review, Judicial Review*

1. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia memegang penuh segala kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, terdapat dua tingkatan pemerintahan berdasarkan ruang lingkup wilayahnya, yaitu pemerintahan pusat (*central government*) dan pemerintahan daerah (*local government*). Pemerintahan pusat adalah lembaga negara yang terdiri atas presiden, wakil presiden, kementerian-kementerian, lembaga negara yang berskala nasional dibawah kekuasaan presiden dan lembaga negara independen yang berskala nasional. Pemerintahan daerah adalah lembaga negara yang mencakup ruang lingkup suatu daerah administratif yang terdiri atas kepala daerah sebagai eksekutif, DPRD sebagai lembaga legislatif dan lembaga-lembaga daerah lain.

Dalam konteks geografis, Republik Indonesia terdiri dari berbagai wilayah provinsi, yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah ini memiliki pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di wilayahnya. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan menjadi pijakan dalam pengaturan dan pengelolaan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 (Indonesia, 1945). Artinya terdapat 38 pemerintahan daerah provinsi dan terdapat 514 pemerintahan daerah kabupaten dan kota memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan sinkron dengan kebijakan pemerintahan pusat.

Otonomi mengandung arti sebagai kemandirian untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi juga mengandung arti sebagai sifat mandiri dan bebas bagi setiap lembaga yang lebih rendah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam lingkup yang lebih rendah atau perpanjangan tangan dari lembaga yang lebih tinggi (Manan, 1994). Daerah adalah wilayah administratif yang terdiri atas masyarakat yang berdomisili dan memiliki kekuasaan pemerintahan. Dihubungkan dengan sistem penyelenggaraan negara, artinya pemerintahan pusat memberikan wewenang pemerintahan daerah berupa otonomi atas daerah tertentu dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum yang lebih cepat dan merata kepada setiap daerah.

Dengan tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah diberikan hak untuk mengesahkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna menjalankan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hak tersebut menyebabkan banyaknya pembuatan peraturan daerah di Indonesia, sebagai bentuk semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wadah aspirasi masyarakat daerah (Indonesia, 1945). Berdasarkan situs resmi peraturan.go.id (situs resmi penghimpun data perundang-undangan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham Republik Indonesia) terdapat 18.817 peraturan daerah di Indonesia yang berstatus berlaku, dengan rincian 3.449 peraturan daerah provinsi, 11.015 peraturan daerah kabupaten dan 4.134 peraturan daerah kota (Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham Indonesia, 2023).

Maka segala peraturan daerah tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan daerah sebagai kewajiban. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan

pemerintahan daerah adalah gubernur dalam wilayah provinsi, bupati dalam wilayah kabupaten dan walikota dalam wilayah kota. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan daerah.

Peraturan daerah merujuk pada suatu bentuk peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum, yang berisi norma-norma dan aturan yang bersifat mengikat secara umum di wilayah daerah yang bersangkutan. Pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang diharapkan dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Dalam konteks perkembangan otonomi daerah, terdapat dampak positif yang termanifestasi melalui penguatan eksistensi peraturan daerah sebagai produk legislatif daerah, yang memberikan payung hukum yang jelas bagi pengembangan aspirasi dan potensi khusus suatu daerah. (Bonadi, Safa'at, & Sudarsono, 2019).

Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Pembentukannya diawali dengan tahap perencanaan dalam proses Prolegda atau program legislasi daerah, untuk kemudian menjadi Raperda atau rancangan peraturan daerah yang akan disusun dan dibahas dalam rapat-rapat DPRD, kemudian ditetapkan dan disahkan oleh DPRD dan kepala daerah dalam rapat paripurna, dan terakhir diundangkan atau disebarluaskan perda dalam lembaran daerah sebagai bentuk informasi dan keterbukaan publik suatu peraturan daerah bagi masyarakat (Indonesia, 2011).

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7(1) poin f dan g menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah jenis peraturan perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2011). Kedua jenis perda tersebut berada pada hirarki paling bawah (perda provinsi dalam hirarki keenam dan perda kabupaten/kota pada hirarki ketujuh atau paling bawah). Sesuai dengan asas hukum yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku pada dua peraturan dengan jenis berbeda saling bertentangan.

Asas tersebut berlaku khusus pada peraturan daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Peraturan daerah berada dalam hierarki yang lebih rendah

dibandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan serupa, serta Peraturan Presiden atau peraturan serupa. Peraturan daerah juga harus mematuhi prinsip bahwa mereka tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan kesusilaan. Kepentingan umum yang dimaksud meliputi gangguan terhadap kerukunan antarwarga masyarakat, gangguan akses terhadap pelayanan publik, gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, gangguan terhadap kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta diskriminasi berdasarkan suku, agama, kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. (Indonesia, 2014). Poin-poin tersebut sangat logis untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat dan menjaga persatuan negara.

Hukum acara pembatalan peraturan daerah di Indonesia memiliki dua sumber yang berbeda, yaitu melalui *executive review* dan *judicial review*. Wewenang eksekutif atau pemerintah Indonesia dalam memeriksa, menguji dan memutuskan status suatu peraturan daerah dapat dilihat dari UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 251. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa (Indonesia, 2011):

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Artinya kewenangan pembatalan peraturan daerah dimiliki oleh menteri (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) dan Gubernur, yang keduanya adalah wakil atau perpanjangan tangan dari Presiden. Presiden memiliki hak untuk menyelenggarakan negara dengan sebaik-baiknya, namun hak Presiden dalam melakukan pengujian peraturan yang sudah berlaku tidak pernah tercantum dalam konstitusi UUD. Presiden hanya berlandaskan kewenangan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Hal tersebut tercantum pada penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berikut akan digambarkan dalam tabel perjalanan kewenangan *Executive Review* dari sumber-sumber hukum yang berkembang.

Tabel 1. Perkembangan Pengaturan Pembatalan Peraturan Daerah

	UU 18/1965	UU 5/1974	UU 22/1999	UU 32/2004	UU 23 /2014
Lembaga Penguji Perda Kab./Kota	Menteri Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri	Pemerintah	Pemerintah	Menteri Dalam Negeri
Lembaga Penguji Perda Provinsi	Kepala Daerah Tingkat Atasnya	Gubernur / Menteri Dalam Negeri	Pemerintah	Pemerintah	Gubernur / Menteri Dalam Negeri
Lembaga Banding Pembatalan Perda	-	-	Mahkamah Agung setelah mengajukan ke Pemerintah	Mahkamah Agung	Gubernur ke Presiden, Bupati/ Walikota ke Menteri Dalam Negeri
Alasan Pembatalan	a. Kepentingan umum b. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya	a. Kepentingan umum b. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya	a. Kepentingan umum b. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya	a. Kepentingan umum b. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya	a. Kepentingan umum b. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya c. Kesusilaan

Pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri secara resmi mengumumkan telah membatalkan dan merevisi 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Dengan rincian 1.765 perda kabupaten/kota yang direvisi/dicabut oleh Mendagri, 1.111 peraturan mendagri

direvisi/dicabut oleh Mendagri, dan 1.267 perda kabupaten/kota yang direvisi/dicabut oleh gubernur (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016).

Contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah, yang dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah). Alasan pembatalan yaitu karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dan terbagi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena kewenangan pemberian izin penyedia, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah Kabupaten/Kota adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Sehingga peraturan tersebut sudah tidak relevan karena konsederan hukumnya sudah berganti (JDIH Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Namun, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan kewenangan pemerintah untuk membatalkan (*executive review*) peraturan daerah, membuat kewenangan Kemendagri dan Gubernur dihapuskan. Alasan pembatalan dijelaskan dalam masing-masing amar putusan dengan berlandaskan pada hal yang sama yaitu menghindari kesewenang-wenangan pemerintah saat mencabut peraturan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan Perda Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat daerah, tetapi dengan dimilikinya kewenangan oleh eksekutif telah menghilangkan hak para Pemohon atas keputusan pembatalan Perda tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Sementara itu, lembaga negara yudikatif yaitu Mahkamah Agung telah dicantumkan kewenangannya yaitu menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dalam pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Wewenang yudikatif atau Mahkamah Agung Indonesia dalam memeriksa, menguji dan memutuskan status suatu peraturan daerah sudah sesuai dengan konstitusi, atau *judicial review* uji peraturan daerah adalah didasari dengan konstitusi.

Berikut akan digambarkan perkembangan kekuasaan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan terhadap UU/ Perda terhadap UU dari 4 rinual konstitusi.

Tabel 2. Perkembangan Mahkamah Agung melaksanakan *Judicial Review*

	UUD 1945 Asli	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD 1945 Amandemen
Lembaga Penguji Perda	Tidak diatur	Mahkamah Agung	Tidak diatur	Mahkamah Agung

Pembatalan peraturan daerah oleh Mahkamah Agung telah dilakukan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 14 P/HUM/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon atas pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. Yang berisi putusan tentang pembatalan atas peraturan daerah yang disimpulkan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang secara geografis merupakan pulau kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, baik mineral logam maupun mineral bukan logam (Mahkamah Agung, 2023).

Kewenangan atas pembatalan peraturan daerah kini hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sebagai lembaga pengujian tertinggi kini perkara yang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung semakin banyak, tidak hanya banyaknya perkara peradilan atau kasasi dan peninjauan kembali tetapi juga memiliki hak sepenuhnya menguji peraturan daerah. Beban berat yang harus dimiliki lembaga penegak keadilan yang satu ini.

Tulisan ini bertujuan memberikan sudut pandang baru bahwa kewenangan eksekutif dalam mencabut peraturan daerah tidak sepenuhnya bermakna buruk seperti amar putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan *disenting opinion*. Tentu demi perbaikan pembangunan hukum ke depan yang lebih baik, beberapa aturan lama yang sudah tidak relevan dengan zaman dan kebutuhan hukumnya perlu dicabut atau revisi tanpa mekanisme yang panjang dan pasif di Mahkamah Agung.

Berdasarkan keterangan kelebihan dan kekurangan *executive review* dan *judicial review*. Serta berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik menulis artikel yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kewenangan *Executive Review* dan *Judicial Review* Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia.”**

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis segala hal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengkajian dokumen-dokumen dengan memanfaatkan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para sarjana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menjelaskan data yang ada dan menggambarkannya dalam bentuk narasi. (Yusuf, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan yang ada dalam setiap sistem hukum yang sedang diselidiki. Jika terdapat persamaan yang signifikan antara sistem-sistem hukum tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengusulkan penyatuan atau unifikasi sistem hukum. Namun, jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka perbedaan tersebut dapat diatasi melalui pengaturan hukum yang berlaku antara berbagai tata hukum yang bersangkutan. (Yusuf, 2014). Hal tersebut sesuai dengan judul tulisan yang akan menganalisis dua bentuk kewenangan lembaga negara berbeda. Sumber data primer atau utama penelitian ini yaitu UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan kementerian, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan daerah dan Putusan pengadilan. Sumber data sekunder adalah jurnal elektronik dan buku elektronik. Sementara sumber data tersiernya adalah berita dari media massa elektrnik dan data yang barasal dari situs resmi negara Republik Indonesia.

Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus

diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian (Yusuf, 2014). Adapun teknik pengelolaan data yang dipergunakan adalah deskriptif, yakni teknik pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, artinya menyesuaikan peraturan yang terdapat dalam peraturan yang memberi wewenang *executive review* dan *judicial review* (Yusuf, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Executive Review

Menurut Polyas (Polyas, 2013) *“The executive is the branch of government responsible for the overall governance of a state. In countries which base their political system on the separation of powers, the executive branch of government is responsible for enforcing and executing laws made by the legislative branch of government.”* Artinya eksekutif adalah suatu cabang kekuasaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara. Eksekutif berwenang sebagai pelaksana dan pelindung peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Negara Republik Indonesia memberikan kekuasaan eksekutif tersebut kepada presiden. Presiden berkewajiban menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, presiden berhak dibantu oleh menteri-menteri. Kementerian dibentuk oleh presiden sesuai dengan kebutuhan pembantuan tugas negara.

Pemerintahan daerah (*local government*) adalah pemerintahan yang mendapatkan limpahan kewenangan oleh pemerintahan pusat atau presiden (*central government*) sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Asas dekosentrasi berarti pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pada wilayah provinsi dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan pada wilayah kabupaten/kota (Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut dapat diselenggarakan seluas-luasnya, kecuali urusan absolut yang tidak boleh diatur pemerintahan daerah yaitu urusan keamanan, pertahanan, yustitisi, moneter dan fiskal, hubungan luar negeri dan urusan agama. Selebihnya dapat diatur sesuai atau sinkronisasi dengan peraturan-peraturan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah juga berarti lembaga eksekutif yang berada dalam ruang lingkup wilayah daerah.

Pengujian atau yang disebut sebagai *review* adalah proses memeriksa, mengadili, dan memutus sah atau tidak sah seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan. Hasil

dari proses pengujian peraturan perundang-undangan adalah ketertiban peraturan-peraturan. Pengujian berdasarkan isi tuntutan dibedakan menjadi dua yaitu, pengujian formil dan materil. Formil hendak menguji persoalan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sementara materil hendak menguji isi muatan baik seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan.

Executive Review adalah proses memeriksa, mengadili, dan memutus sah atau tidak sah seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara eksekutif atau yang memegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini bersifat konvensi atau hadir akibat kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, akibat kaburnya pembatasan kekuasaan pada eksekutif di UUD NRI sebelum amandemen atau yang pertama. Bukan sekedar kabur, bahkan tidak ada isi konstitusi yang membahas tentang pembagian kekuasaan pengujian undang-undang atau review pada UUD pertama, akibatnya kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan pengujian peraturan secara sewenang-wenang atas peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.

Selanjutnya berkembang selaras dengan perkembangan hukum dan dimasukkan dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU inilah yang menjadi payung hukum pertama *executive review* atas peraturan dalam hirarki bawah untuk dilakukan pengujian. Artinya, *executive review* pada saat itu hadir, justru karena terdapat kekosongan hukum pada zaman itu. Setelah amandemen UUD, konstitusi memberikan wewenang terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan proses pengujian peraturan yang bermasalah. Hal tersebut membuat *executive review* dipertanyakan kedudukan hukumnya akibat pemberian kewenangan kepada MA dan MK.

Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan *executive review* atas pengujian peraturan daerah bermasalah dalam hal ini berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud adalah Presiden, Kementerian (Kemendagri) dan Gubernur.

3.2 Judicial Review

Judicial Review adalah wewenang menguji peraturan-peraturan dalam proses peradilan. Pengujian atau yang disebut sebagai *review* adalah proses memeriksa, mengadili, dan memutus sah atau tidak sah seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tulisan ini, mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yang disebabkan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Proses pengujian ini berujuan untuk menertibkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada awalnya, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang atau hak untuk melakukan pengujian peraturan dalam peradilan. Kewenangan penuh itu baru, diberikan pada saat amandemen UUD kedua. Namun sebelum itu, sebenarnya Mahkamah Agung telah diberikan wewenang untuk melakukan *judicial review*, pertama kalinya terdapat suatu produk hukum berupa UU Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah daripada Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Setelah amandemen UUD, Mahkamah Agung diberi kewenangan atributif untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, berarti Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian baik secara material maupun secara formal. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan *judicial review* atas pengujian peraturan daerah bermasalah dalam hal ini, yang dimaksud adalah Mahkamah Agung.

3.3 Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia

Pembatalan adalah penidakberlakuan lagi atau proses batalnya sesuatu yang pernah berlaku. Arti batal dapat berarti tidak berlaku, tidak sah, digagalkan, tidak menghasilkan dan dapat juga berarti ditunda (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang berbentuk hukum yang tertulis, dimana peraturan ini berisi aturan norma-norma yang bersifat mengikat secara umum dalam domisili daerah. Bentuk peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat daerah agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan (norma) yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Dampak positif berkembangnya otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi peraturan daerah, sebagai produk legislatif daerah yang memungkinkan pengembangan segala aspirasi dan potensi istimewa suatu daerah mendapat payung hukum yang jelas (Bonadi, Safa'at, & Sudarsono, 2019).

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7(1) poin f dan g menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah

jenis peraturan perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011). Kedua jenis perda tersebut berada pada hirarki paling bawah (perda provinsi dalam hirarki keenam dan perda kabupaten/kota pada hirarki ketujuh atau paling bawah). Sesuai dengan asas hukum yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku pada dua peraturan dengan jenis berbeda saling bertentangan.

Asas tersebut berlaku khusus pada peraturan daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Peraturan yang secara hirarki berada di atas peraturan daerah adalah UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah atau sejenisnya dan Peraturan Presiden atau sejenisnya. Peraturan daerah juga harus memperhatikan prinsip bahwa mereka tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan kesusilaan. Kepentingan umum yang dimaksud mencakup aspek-aspek yang terdiri dari terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Peraturan daerah yang bertentangan dan mengganggu kepentingan umum, hanya dapat dibatalkan oleh lembaga negara Mahkamah Agung (sebelumnya pemerintahan pusat atau eksekutif memiliki kewenangan, namun telah dicabut wewenangnya oleh MK).

3.4 Analisis Perbandingan

Secara yuridis, dalam indikator ini menekankan proses pembatalan peraturan daerah yang berkesesuaian dengan hukum (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Yuridis berarti sesuai dengan hukum. Lembaga negara baik eksekutif (pemerintah) maupun yudikatif (Mahkamah Agung) akan diuji wewenangnya saat ini atas kewenangan pengujian/pembatalan peraturan daerah.

Pertama, *executive review* berdasarkan hukum berlandaskan pada UU yang telah berkembang dari masa ke masa. Dimulai dari UU No. 18 Tahun 1965, kemudian UU No. 5 Tahun 1974, kemudian UU No. 22 Tahun 1999, kemudian pasca amandemen diatur dalam

UU No. 32 Tahun 2004 dan masih diberi wewenang dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kelima peraturan tersebut berorientasi sama yaitu tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan yang terakhir yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan kewenangan pemerintah yaitu pada pasal 251. Namun, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan kewenangan pemerintah untuk membatalkan (*executive review*) peraturan daerah, membuat kewenangan Kemendagri dan Gubernur dihapuskan. Artinya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah sudah dinyatakan tidak ada lagi.

Kedua, *judicial review* oleh Mahkamah Agung telah dicantumkan kewenangannya yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dalam pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Wewenang yudikatif atau Mahkamah Agung Indonesia dalam memeriksa, menguji dan memutuskan status suatu peraturan daerah sudah sesuai dengan konstitusi, atau *judicial review* uji peraturan daerah adalah didasari dengan konstitusi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi. Dalam indikator ini Mahkamah Agung, telah yuridis dalam melakukan pengujian maupun pembatalan peraturan daerah.

Kemudian, masih secara Yuridis kali ini digunakan indikator upaya banding atas putusan pembatalan peraturan daerah oleh lembaga negara. Intrumennya adalah dapat atau tidak dapat melakukan uji banding. Uji banding penting dijadikan indikator sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih adil.

Pertama, dilihat dari sudut pandang penguji eksekutif yaitu pemerintah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 terdapat dua upaya banding atau keberatan yaitu di poin 7 dan 8. Gubernur yang keberatan atas pembatalan peraturan daerah provinsi, dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dalam 14 hari pasca putusan keluar. Bupati/Waalikota yang keberatan atas pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam 14 hari pasca putusan.

pencantuman kewenangan tersebut, *executive review* dinyatakan memiliki upaya banding atas pembatalan peraturan daerah.

Kedua, dilihat dari pengujian peraturan daerah dengan bantuan *judicial review*. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi, pasal 9 atau aturan peralihan menyatakan bahwa keputusan pengadilan atas permohonan keberatan pegujian perda tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Atrinya baik putusan dikabulkan maupun ditolak, putusan hakim menjadi *final*. Tidak ada upaya lain lagi yang dapat membatalkan putusan tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki fasilitas upaya banding.

Secara filosofis, dalam indikator ini kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah dan Mahkamah Agung akan didasari pada kebutuhan pada masyarakat dan status lembaga negara. Indikator kebutuhan masyarakat mengukur salah satu contoh pembatalan peraturan oleh lembaga negara, telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Indikator status lembaga negara melihat peran lembaga negara dalam proses pengmbatalan peraturan daerah.

Pertama, variabel antara pemerintah yang mencabut peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diuji dengan contoh: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 secara resmi membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah (Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah).

Pembatalan tersebut dilakukan karena Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengalami perubahan dan juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Penyebab utama pembatalan tersebut adalah adanya perbedaan kewenangan dalam hal pemberian izin penyedia, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air di wilayah sungai dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, yang sebenarnya merupakan kewenangan yang melekat pada Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut sudah tidak relevan karena konsederan hukumnya sudah berganti. Pembatalan Perda ini sudah sesuai kebutuhan masyarakat akan perkembangan zaman tentang pengelolaan retribusi

daerah. Indikator ini pembatalan perda telah dianggap memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan variabel kedua yaitu, status lembaga negara hendak menguji tentang peran pemerintah dalam proses pembatalan peraturan daerah. Status disini ditekankan pada proses pertamanya yaitu pengajuan atau inisiatif dalam membatalkan peraturan daerah yang bermasalah.

Setelah melihat UU No. 23 Tahun 2014, peran pemerintah disini dinyatakan aktif dalam upaya pembatalan peraturan daerah yang bermasalah. Hal tersebut dibuktikan dengan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri secara resmi mengumumkan telah membatalkan dan merevisi 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Dengan rincian 1.765 perda kabupaten/kota yang direvisi/dicabut oleh Mendagri, 1.111 peraturan mendagri direvisi/dicabut oleh Mendagri, dan 1.267 perda kabupaten/kota yang direvisi/dicabut oleh gubernur (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Artinya pemerintah dinyatakan berupaya dalam mewujudkan proses percepatan pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kedua, variabel pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan *judicial review* yang hendak menguji suatu kasus ataukah contoh yang relevan. Putusan Mahkamah agung dalam perkara Nomor 14 P/HUM/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon atas pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. Yang berisi putusan tentang pembatalan atas peraturan daerah yang disimpulkan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang secara geografis merupakan pulau kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, baik mineral logam maupun mineral bukan logam. Telah dinyatakan bermanfaat, karena telah menjunjung hak-hak masyarakat kecil dalam melawan kesewenang-wenangan pembuat peraturan daerah.

Namun, dalam variabel stutus hukum, Mahkamah Agung dinilai pasif atau menunggu. Mahkamah Agung hanya akan menguji peraturan daerah yang bertentangan atau bermasalah, jika terdapat laporan pengajuan keberatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi. Selain di Mahkamah Agung, pengajuan dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri sesuai domisili warga negara. Dan kelemahan lainnya yaitu, pemohon diharuskan membayar biaya

permohonan perkara pada saat proses pendaftaran perkara. Hal tersebut harusnya tidak menjadi kewajiban seorang pemohon saja, karena bagaimanapun keputusan pengadilan atau Mahkamah Agung akan ditujukan dan mengikat masyarakat daerah secara keseluruhan. Mungkin opsionalnya, kewajiban membayar biaya permohonan keberatan lebih baik disamakan dengan Mahkamah Konstitusi. Dimana pengajuan perkara pengujian UU terhadap UUD dinyatakan gratis. Secara sosiologis, dalam indikator ini kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah dan Mahkamah Agung akan didasari pada waktu proses pengujian/pembatalan dan kemandirian lembaga negara.

Pertama, hubungan variabel pemerintah yang membatalkan peraturan daerah dengan kondisi waktu proses pembatalan perda. Maksud dari variabel ini adalah untuk menguji efektifitas waktu lembaga negara, semakin cepat suatu peraturan daerah dinyatakan statusnya maka semakin cepat kepastian hukum yang didapatkan oleh masyarakat. Sebaliknya semakin lambat waktu proses pengujian perda maka semakin lambat kepastian hukum yang didapatkan masyarakat. Sebagai contoh, ketika waktu pengujian lambat atas peraturan daerah yang meresahkan masyarakat, maka penderitaan masyarakat akan semakin lama pula.

Dari perspektif pemerintah, pembatalan peraturan daerah yang bermasalah dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing bangsa dalam era kompetisi. Peraturan daerah yang dimaksud merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang proses birokrasi, menghambat investasi, dan menghambat kemudahan berusaha. Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri secara resmi mengumumkan pembatalan dan revisi sebanyak 3.143 peraturan daerah yang tergolong bermasalah. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat dalam menguji dan membatalkan peraturan daerah yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kemandirian lembaga negara merupakan indikator yang menguji asas independensi suatu lembaga negara dalam melakukan pembatalan perda. Lembaga negara yang independen berarti bebas dan mandiri dari intervensi yang lain. Kemandirian ini dapat diukur dengan cara melihat rekam jejak atau integritas lembaga negara selama ini.

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam *executive review*, terdapat beberapa ketidakpuasan atas independensi pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan Perda Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat daerah, tetapi dengan dimilikinya kewenangan oleh eksekutif telah menghilangkan hak para Pemohon atas keputusan pembatalan Perda tersebut. Landasan tersebut juga menjadi landasan keluranya Putusan MK 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dan mendagri mencabut peraturan daerah. Artinya, dalam indikator kemandirian lembaga negara, pemerintah pusat dan mendagri dinyatakan sewenang-wenang dalam membatalkan peraturan daerah.

Berdasarkan variabel waktu proses pembatalan peraturan daerah dengan lembaga Mahkamah Agung, akan diuji dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi pasal 9 (2) tentang tenggat waktu pelaksanaan putusan. Disebutkan dalam bunyi pasal *a quo* bahwa dalam hal setelah 90 hari putusan pengadilan membatalkan peraturan daerah dicabut, namun pelaksanaan putusan belum dilaksanakan atau masih memberlakukan perda, maka perda tersebut akan dinyatakan batal demi dengan sendirinya. Tentu tenggat waktu yang cukup lama bagi masyarakat merasakan peraturan daerah yang bermasalah tetap saja berlaku walau sudah diputuskan dalam pengadilan bahwa perda tidak sah. Artinya dalam indikator ini, waktu proses pembatalan perda tidak efektif karena dinyatakan lambat dan merugikan masyarakat.

Indikator kemandirian lembaga Mahkamah Agung dalam membatalkan perda akan diuji dengan melihat integritas Mahkamah Agung dan yuridis Mahkamah Agung. Hingga saat ini, dinyatakan belum ada keterangan akademik atau yuridis buruk, mengenai integritas Mahkamah Agung menguji dan membatalkan peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan UUD NRI pasal 24A yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indikator ini menyatakan independensi Mahkamah Agung dalam menguji atau membatalkan peraturan daerah.

Tabel 3. Analisis Perbandingan *Executive review* dan *Judicial review*

	<i>Executive Review</i>	<i>Judicial Review</i>
Yuridis/Sesuai Hukum	Tidak	Sesuai
Upaya Banding	Ada	Tidak ada

Status Lembaga Negara	Aktif	Pasif
Kebutuhan Masyarakat	Memenuhi kebutuhan	Memenuhi kebutuhan
Waktu Proses Pengujian/Pembatalan	Cepat	Lambat
Kemandirian Lembaga Negara	Telah dinyatakan sewenang-wenang	Independen

Berdasarkan uraian dan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa baik kewenangan *judicial review* maupun *executive review*, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan indikator di atas. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membatalkan peraturan daerah dinyatakan telah sesuai dengan hukum, memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi lembaga negara yang Independen, tetapi memiliki kekurangan pada statusnya yang pasif, proses pengujian yang lambat dan tidak ada upaya banding dalam mencari keadilan hukum. Sementara kewenangan *executive review* telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi akibat dari putusan MK, putusan MK tersebut secara tegas membuktikan bahwa eksekutif dinyatakan sewenang-wenang dalam membatalkan perda dan merampas hak masyarakat. Namun perlu dilihat juga, jika saja eksekutif memberlakukan kewenangan pengujian peraturan tersebut dengan baik dan lebih independen, maka *executive review* dapat berdampingan dengan *judicial review* dalam pengujian/pembatalan peraturan daerah.

4. Simpulan

Peraturan daerah merupakan sebuah bentuk peraturan hukum yang tertulis, yang mengandung norma-norma yang mengikat secara umum dalam lingkup wilayah daerah tersebut. Peraturan daerah haruslah konsisten dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi darinya dan tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan kesusilaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap kedua indikator tersebut, maka peraturan daerah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Sebelumnya, pembatalan perda dapat dilakukan oleh pihak eksekutif (*executive review*) oleh Presiden dengan bantuan Kemendagri dan Gubernur. Kewenangan tersebut tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 251. Namun

setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

Mahkamah Agung dan badan peradilan negeri di bawahnya, menjadi lembaga yang kini memegang kewenangan pengujian dan pembatalan peraturan daerah (*judicial review*). Mahkamah Agung mendapat kuasa langsung dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A, bahwa salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian dibuatkan prosedur acaranya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 jo. No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi.

Berdasarkan enam variabel perbandingan, dinyatakan bahwa *executive review* maupun *judicial review* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Variabel perbandingan yaitu berdasarkan indikator yuridis/kesesuaian dengan hukum, upaya banding, status lembaga negara, kebutuhan masyarakat, waktu proses pengujian/pembatalan dan kemandirian lembaga negara. Jika saja eksekutif memberlakukan kewenangan pengujian peraturan tersebut dengan baik dan lebih independen, maka *executive review* dapat berdampak dengan *judicial review* dalam pengujian/pembatalan peraturan daerah, yang akan membantu percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Retrieved from https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf
- Bonadi, A., Safa'at, R., & Sudarsono. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 Tentang Pembatalan Kewenangan Gubernur Dalam Membeatalakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 2.
- Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham Indonesia. (2023). *Peraturan Daerah*. Retrieved from <http://peraturan.go.id/perda>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). *Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalakan*. Retrieved from <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalakan/>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Tabun 1945*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang No.12 Tabun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tabun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- JDIH Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Daerah yang Provinsi Jawa Tengah yang Dibatalakan oleh Pemerintahan Pusat*.
- Mahkamah Agung. (2023). *Putusan Mahkamah Agung No.14 P/HUM/2023*.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015*.
- Mahkamah Konstitusi. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016*.

- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Polyas. (2013). *The Excdutive Branch of Government Explained*. Retrieved from <https://www.polyas.com/election-glossary/executive-branch>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.